

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, terjadi perpindahan kewenangan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dan mengalami pergeseran dari model sentralistik ke model desentralistik. Perwujudan bagi pemerintah daerah untuk dapat mandiri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan manajemen sumber daya ekonomi daerahnya secara mandiri disebut dengan otonomi daerah. Pernyataan tersebut sesuai dengan definisi otonomi daerah sebagai daerah otonom yang berwenang untuk mengelola dan mengatur kepentingan publiknya sendiri berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan peraturan tersebut telah menciptakan metode baru untuk mengimplementasikan otonomi daerah, yakni dengan memberikan otonomi yang lengkap, menyeluruh, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat sehingga diharapkan mampu menjadi pedoman bagi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tujuan dari pemisahan berbagai kewenangan ke daerah dari pusat adalah untuk memungkinkan pengelolaan urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan tugas pembantuan dan prinsip otonomi sehingga dapat melaksanakan mempercepat perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat di suatu daerah. Agar daerah dapat mandiri secara ekonomi dan warganya menjadi sejahtera, diharapkan

pemerintah daerah juga dapat memperhatikan daya saing kawasan untuk ditingkatkan dengan memanfaatkan keragaman sumber daya dan potensi daerah melalui pemberdayaan, peningkatan pelayanan, dan partisipasi masyarakat.

Pemanfaatan sektor pariwisata adalah salah satu upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat karena setiap daerah mempunyai berbagai potensi yang mampu dimanfaatkan menjadi objek wisata. Pernyataan tersebut diperkuat oleh adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, di mana istilah pariwisata mengacu pada beragam jenis kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata yang diperkuat dengan bermacam sarana, prasarana, dan pelayanan yang difasilitasi oleh masyarakat, pemerintah pusat, ataupun pemerintah daerah. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, maka dilakukan penjaminan koherensi antarsektor, antardaerah, dan antarpusat yang sistematis dalam kerangka otonomi daerah serta koherensi antar-*stakeholders*, dengan tetap menjaga kelestarian alam, lingkungan hidup, dan sumber daya.

**Tabel 1.1 Capaian Sektor Pariwisata Pada Tahun 2022 dan Target Tahun 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Devisa Pariwisata</b>	<b>Kontribusi PDB Pariwisata</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata</b>
2020	3,38 Miliar USD	2,24%	20,43 Juta Orang
2021	0,49 Miliar USD	2,40%	21,26 Juta Orang
2022	4,26 Miliar USD	3,60%	22,89 Juta Orang
2023	2,07 – 5,95 Miliar USD	4,1%	22,40 Juta Orang

Sumber: Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 Kemenparekraf, 2023.

Industri yang paling menjanjikan adalah pariwisata karena dapat meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) negara, menghasilkan devisa, menambah lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian nasional. Dikutip dari kanal YouTube Kemenparekraf yang menyelenggarakan Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan mempresentasikan data Badan Pusat Statistik (BPS), total pengunjung mancanegara ke Indonesia telah melampaui batas atas atau target optimis yang ditentukan, yaitu sekitar 3,6 juta orang, dan telah mencapai 3,92 juta. Temuan ini menciptakan nilai devisa pariwisata senilai \$4,26 miliar. Ada juga tren yang baik dalam jumlah pengunjung domestik yang meningkat sebesar 15 persen menjadi 633-733 juta perjalanan di dalam negeri setiap tahunnya. Dengan semua pencapaian tersebut, pada Tabel 1.1 memproyeksikan bahwa kontribusi pariwisata terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) akan meningkat sebesar 50% dari 3,6% pada tahun sebelumnya. Dalam presentasinya, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjelaskan bagaimana ekspansi industri ekonomi kreatif dan pariwisata di tahun 2022 yang dibuktikan pada sektor pariwisata yang terdapat penyerapan tenaga kerja sebanyak 22,89 juta orang.

Kabupaten Magelang menjadi salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang memiliki berbagai peluang pariwisata yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, yang saat ini telah diklaim menjadi destinasi super prioritas yang dapat menjadi magnet bagi banyak pengunjung, baik dari luar maupun dalam negeri yang berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara dan pendapatan daerah. Namun, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat sekitar di Kecamatan Borobudur

yang masih hidup begitu sederhana, bahkan hidup di garis kemiskinan. Nilai historis dan keindahan alam Candi Borobudur menarik pengunjung domestik dan mancanegara, namun ironinya, penduduk setempat yang tinggal di dekatnya tidak mendapatkan keuntungan finansial dari destinasi wisata tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh pendapatan per kapita Kecamatan Borobudur yang hanya mencapai Rp7,7 juta antara tahun 2011 dan 2015, yang menempatkannya di urutan keenam dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang secara keseluruhan (Fitriyanti, 2018).

**Tabel 1.2 Perbandingan Pendapatan Perkapita Tiga Kecamatan di Kabupaten Magelang Periode 2011-2015**

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Pendapatan Perkapita</b>
Kecamatan Srumbung	Rp15.400.000
Kecamatan Ngablak	Rp11.000.000
Kecamatan Borobudur	Rp7.700.000

Sumber: <https://data.magelangkab.go.id/opendata> , 2023.

Capaian tersebut tergolong sangat kecil jika mengingat wisata Candi Borobudur yang sudah terkenal tidak hanya di dalam negeri melainkan juga internasional. Jika dibandingkan dengan dua kecamatan lain di Kabupaten Magelang berdasarkan Tabel 1.2 di atas, yakni Kecamatan Ngablak yang terletak di lereng Gunung Merbabu dengan pendapatan mencapai 11 juta dan Kecamatan Srumbung yang terletak di kaki Gunung Merapi dengan pendapatan yang mencapai Rp15,4 juta, maka pendapatan Kecamatan Borobudur pada waktu itu yang dianggap sebagai jantung pariwisata Magelang bahkan masih jauh di bawah dua kecamatan tersebut. Dalam rangka meningkatkan taraf dan pertumbuhan ekonomi desa di kawasan Candi Borobudur, Kementerian BUMN menjalankan salah satu

program prioritas, yaitu dengan mendirikan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) pada 20 desa di Kecamatan Borobudur (Adhian, 2017). Selain itu, pembentukan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di setiap desa di Kecamatan Borobudur juga berkontribusi pada pengembangan daerah tujuan wisata di sekitar Candi Borobudur dan bertujuan untuk memperpanjang durasi kunjungan pengunjung. Berikut adalah daftar 20 Balkondes di Kecamatan Borobudur.

**Tabel 1.3 Daftar 20 Balkondes di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang**

No.	Nama Balkondes	Lokasi	BUMN Sponsor
1.	Balkondes Tuksongo	Dusun Kesawan, Desa Tuksongo	PT Telekomunikasi Indonesia
2.	Balkondes Wringinputih	Dusun Bojong, Desa Wringinputih	PT Pertamina
3.	Balkondes Wanurejo	Dusun 9, Desa Wanurejo	PT Bank Negara Indonesia (BNI)
4.	Balkondes Tanjungsari	Dusun V, Desa Tanjungsari	PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)
5.	Balkondes Majaksingi	Dusun Karang Bawang, Desa Majaksingi	PT Jasa Marga
6.	Balkondes Kenalan	Dusun Keraloko, Desa Kenalan	PT Bank Mandiri
7.	Balkondes Kembanglimus	Dusun Nglepon, Desa Kembanglimus	PT Patra Jasa
8.	Balkondes Giritengah	Dusun Kalitengah, Desa Giritengah	PT Jasa Raharja
9.	Balkondes Karanganyar	Dusun Banjaran 2, Desa Karanganyar	PT Bank Tabungan Negara (BTN)
10.	<b>Balkondes Karangrejo</b>	<b>Dusun Bumen Djelapan, Desa Karangrejo</b>	<b>PT Perusahaan Gas Negara (PGN)</b>
11.	Balkondes Kebonsari	Dusun Dalangan, Desa Kebonsari	PT Utama Karya (Persero)
12.	Balkondes Bigaran	Dusun Karangasari, Desa Bigaran	PT Angkasa Pura I

13.	Balkondes Borobudur	Dusun Ngaran, Desa Borobudur	PT TWC Borobudur Prambanan dan Ratu Boko
14.	Balkondes Bumiharjo	Dusun Sigug, Desa Bumiharjo	PT Pembangunan Perumahan (PP)
15.	Balkondes Candirejo	Dusun Sangen, Desa Candirejo	PT Semen Indonesia (SIG)
16.	Balkondes Saka Pitu	Dusun Pembulan, Desa Tegalarum	PT Angkasa Pura II
17.	Balkondes Sambeng	Dusun Sawah, Desa Sambeng	PT Perkebunan Nusantara III
18.	Balkondes Ngargogondo	Dusun Karang Bawang, Desa Ngargogondo	PT Pegadaian
19.	Balkondes Ngadiharjo	Dusun Ngabean, Desa Ngadiharjo	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
20.	Balkondes Giripurno	Dusun Gintung, Desa Giripurno	PT TWC Borobudur Prambanan Ratu Boko

Sumber: <http://balkondesborobudur.com/desa-wisata/> , 2023.

Sebuah program pemberdayaan masyarakat desa yang disebut Balai Ekonomi Desa (Balkondes) bertujuan untuk memberikan pengaruh yang lebih besar kepada desa-desa di sekitar tempat wisata populer agar mereka dapat memperoleh keuntungan finansial dari bidang pariwisata. Program tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sehingga terbentuk kemitraan antara BUMN Sponsor atau Pendamping yang mewakili Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) (Filia dan Alfirdaus, 2020). Hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dan potensi desa agar nantinya dapat bernilai jual sehingga mampu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing desa di Kecamatan Borobudur.

Meskipun pembangunan infrastruktur Balkondes telah dilakukan oleh BUMN, masyarakat kini memiliki kendali penuh atas Balkondes berkat BUMDes. Alhasil, untuk menambah tingkatan mutu sumber daya manusia sebagai penyedia layanan pariwisata, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, adanya Balkondes ini adalah sebagai alternatif destinasi wisata selain Candi Borobudur. Selain mengunjungi Candi Borobudur, pengunjung juga disarankan untuk bersafari di sekitar desa-desa terdekat dan dapat berkontribusi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat menghasilkan nilai jual pada barang atau jasa.

Program Balai Ekonomi Desa ini merupakan program Kementerian BUMN yang direalisasikan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Namun saat ini secara khusus, pembangunan Balkondes ditujukan untuk merangsang pertumbuhan pariwisata di Kawasan Candi Borobudur, serta sebagai langkah awal bagi warga desa untuk menggali, mengenalkan, dan mengembangkan beragam potensi desanya. Pada Tabel 1.3., Balkondes Karangrejo menjadi salah satu balkondes di Kecamatan Borobudur yang letaknya sekitar 3 kilometer ke arah selatan dari Candi Borobudur, tepatnya di Dusun Bumen Djelapan, Desa Karangrejo. Balkondes Karangrejo ini diusung sebagai bentuk pelibatan aktif pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara BUMN Sponsor, yaitu PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan BUMDes Bumi Mulia Karangrejo. Berbagai usaha ada di Balkondes Karangrejo, meliputi unit usaha *homestay* Karangrejo, unit usaha *restaurant*, unit usaha penyediaan paket wisata safari, dan unit usaha UMKM

lainnya yang berasal dari Desa Karangrejo sendiri. Berikut adalah data jumlah pengguna jasa Balkondes Karangrejo dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

**Tabel 1.4 Jumlah Pengguna Jasa Balkondes Karangrejo Tahun 2017-2022**

Tahun	Jumlah Pengguna Jasa Balkondes		Total
	Balkondes	Homestay	
2017	3.927	90	4.017
2018	4.163	851	5.014
2019	5.783	1.911	7.694
2020	4.476	1.454	5.930
2021	4.336	1.856	6.192
2022	10.629	3.971	14.663

Sumber: Arsip Balkondes Karangrejo, 2023.

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, sejak dibangunnya Balkondes Karangrejo pada tahun 2017 hingga tahun 2019 telah mengalami peningkatan jumlah pengguna atau pengunjung yang signifikan, baik dari yang hanya sekadar berkunjung untuk menikmati panorama di Balkondes Karangrejo atau membeli produk-produk UMKM yang ada, dan yang melakukan penginapan di *Homestay* Karangrejo. Meskipun pada tahun 2020 jumlah pengunjung Balkondes mengalami tren penurunan yang cukup signifikan, yakni hanya mencapai 5.930 pengunjung akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan dilaksanakannya pembatasan mobilisasi masyarakat. Hal tersebut tidak berlangsung lama karena di tahun 2022 jumlah pengunjung mengalami peningkatan kembali yang sangat signifikan hingga mencapai 14.663 pengunjung. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo, terutama melalui hadirnya Truntum Gasblock Borobudur yang baru dibangun pada tahun 2022 lalu



yang turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pengguna jasa Balkondes Karangrejo.

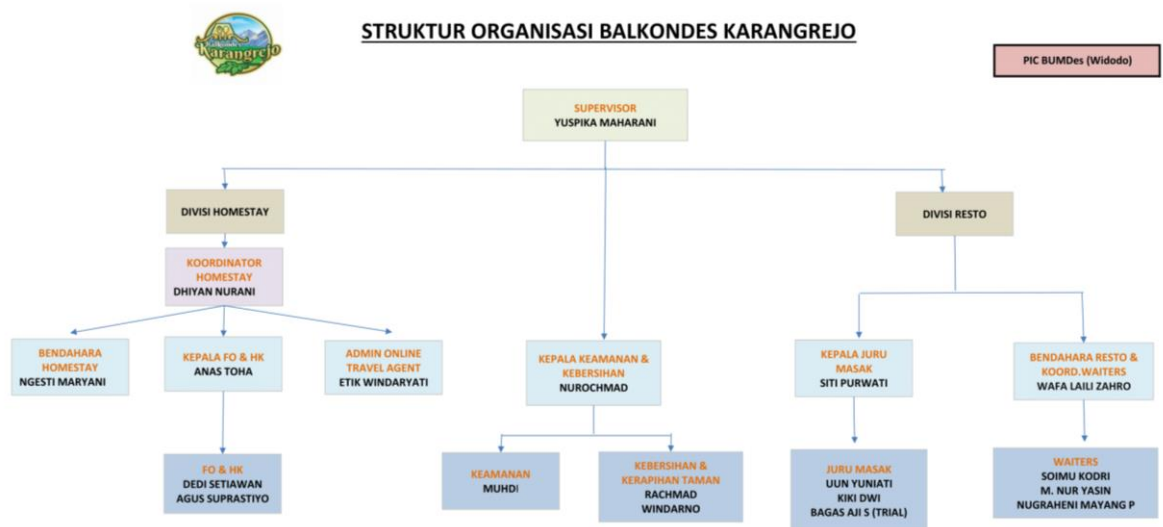
Dikutip dari laman berita *Kompas.com*, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menuturkan bahwa *homestay* di Balkondes Karangrejo dengan standar kelas dunia ini menjadi salah satu yang terbaik karena unsur penataannya dan kebersihan lingkungannya. Ada total 20 *homestay* di Balkondes Karangrejo yang terbagi dalam tiga kategori, antara lain *single*, *couple*, dan *family*. *Homestay* ini memiliki gaya arsitektur Joglo, yang ditandai dengan dominasi elemen kayu pada rumah-rumah tradisional Jawa. Unit *homestay* ini diapit oleh hamparan sawah yang menghijau, menambah suasana pedesaan yang kental. Pemandangan alam Perbukitan Menoreh yang memanjang dari barat ke timur juga disuguhkan kepada para tamu. Balkondes Karangrejo menyediakan lebih dari sekadar *homestay*, yakni menawarkan salah satu paket wisata safari atau tur keliling dusun dengan mobil *Volkswagen* dan para tamu dapat menikmati berbagai pertunjukan seni di pendopo terbuka atau panggung seni. Di wilayah Desa Karangrejo juga terdapat objek wisata Punthuk Setumbu, Bukit Rhema, dan Bukit Barede yang berlokasi tidak jauh dari *Homestay* Balkondes Karangrejo yang dikelola oleh BUMDes Bumi Mulia Karangrejo.

Jatmika Budi Santoso selaku Direktur PT Manajemen CBT Nusantara (MCN) menyelenggarakan malam penghargaan Borobudur Awards 2019 sebagai bentuk apresiasi kepada para pemangku kepentingan atas kinerja mereka di 20 Balkondes yang berada di bawah binaan BUMN. Ada tujuh kategori yang dinominasikan, menurut artikel berita dari *Tribun Jogja*. Kategori tersebut adalah

Balkondes Terbersih, Balkondes Tata Kelola Terbaik, Balkondes Pemberdayaan Masyarakat Terbaik, Balkondes Terfavorit, Balkondes dengan BUMN Pendamping Terbaik, Balkondes Karyawan Terbaik, dan *Best of The Best* Balkondes. Balkondes Karangrejo berhasil meraih empat nominasi penghargaan dari tujuh nominasi yang diajukan, yaitu Balkondes Terbaik, Karyawan Terbaik, Balkondes Terbersih, dan *Best of The Best* Balkondes. Perolehan penghargaan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah desa dan masyarakatnya untuk terus berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan dalam pengembangan Balkondes Karangrejo.

Balai Ekonomi Desa Karangrejo dikembangkan melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan mempekerjakan individu-individu yang merupakan penduduk asli desa tersebut. Pemerintah Desa Karangrejo lebih memprioritaskan warga asli Desa Karangrejo dalam mengelola Balkondes Karangrejo. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat, khususnya bagi pemuda-pemuda di Desa Karangrejo. Harapannya pemuda tersebut dapat menjadi motor penggerak bagi masyarakat Desa Karangrejo untuk turut aktif mengelola dan mengembangkan Balkondes Karangrejo sebagai bentuk upaya pemberdayaan guna menuju kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah gambar terkait struktur organisasi Balkondes Karangrejo yang seluruh anggotanya merupakan masyarakat asli Desa Karangrejo.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balkondes Karangrejo**



Sumber: Arsip Balkondes Karangrejo, 2023.

Keberadaan Balkondes Karangrejo ini sangat berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD Desa Karangrejo sehingga perlahan masyarakat desa dapat keluar dari angka kemiskinan. Dahulunya, sekitar separuh dari masyarakat yang tinggal di Desa Karangrejo menerima bantuan langsung tunai (BLT) karena termasuk salah satu desa miskin di Kecamatan Borobudur. Ada pasang surut dalam proses menumbuhkan kemandirian di antara penduduk Desa Karangrejo. Kehadiran Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu, Ganjar Pranowo, dalam acara “Ngopi Bareng Mas Ganjar” di Bukit Rhema pada tahun 2014 menandai awal kebangkitan Desa Karangrejo. Acara tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Desa Karangrejo untuk menyampaikan keluh-kesahnya sehingga banyak lembaga-lembaga di Provinsi Jawa Tengah juga sejumlah sektor privat yang tertarik untuk membantu pengembangan Desa Karangrejo.

Desa Karangrejo menerima bantuan senilai Rp10 juta dan Rp90 juta untuk pengembangan seni budaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, bantuan sebesar Rp1 miliar dikucurkan untuk membangun kebun buah, *Tourism Information Center* (TIC), dan mengoptimalkan kinerja Balkondes Karangrejo. Sampai saat ini, Desa Karangrejo telah mandiri dan berhasil melepaskan diri dari garis kemiskinan dan mampu menghasilkan lebih dari Rp2,7 miliar dalam satu tahun. Jika dirinci, pendapatan tersebut bersumber dari Punthuk Setumbu yang menghasilkan pendapatan sekitar Rp2 miliar per tahun, sementara Balkondes diperkirakan menghasilkan pendapatan sebesar Rp700 juta.

**Tabel 1.5 Kontribusi Balkondes Karangrejo Terhadap PAD Desa Karangrejo**

No.	Tahun	Jumlah PAD
1.	2017	Rp37.407.500
2.	2018	Rp133.224.000
3.	2019	Rp129.944.000
4.	2020	Rp22.645.000
5.	2021	Rp133.022.000
6.	2022	Rp151.194.000
Jumlah		Rp607.436.500

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Karangrejo, 2023.

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas, kontribusi Balkondes Karangrejo terhadap PAD Desa Karangrejo setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. Maka dari itu, peran Balkondes Karangrejo dalam pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan PADes Karangrejo tidak diragukan lagi. Dalam rangka mencapai pembangunan

ekonomi suatu bangsa, pemberdayaan masyarakat mengacu pada upaya yang disengaja yang dilakukan oleh sektor publik, swasta, atau masyarakat untuk meningkatkan standar hidup dan mendorong kesejahteraan masyarakat di semua lini, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Namun, dalam praktiknya, pembangunan di Indonesia masih mencerminkan kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan, yang mengarah pada aspek kesejahteraan yang timpang, dibuktikan dengan standar hidup di desa yang tidak lebih tinggi daripada di kota (Hidayat, 2020). Oleh karena itu, salah satu inisiatif pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa adalah dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses memperkuat atau meningkatkan daya dengan menawarkan bantuan yang dilandasi oleh kebebasan masyarakat untuk mengelola peluang yang ada dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan kemampuannya dengan mengikuti beragam kegiatan (Almasri dan Deswimar, 2014). Dengan inisiatif pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai titik fokus pembangunan. Keberlanjutan pemberdayaan yang dapat dilakukan secara berkesinambungan menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pihak yang mengetahui potensi daerahnya dan dapat memutuskan bagaimana seharusnya mereka memaksimalkan peluang dari daerahnya, serta memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan.

Desa, yang secara numerik lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kelurahan, merupakan tingkat administrasi pemerintahan terendah di suatu negara (Naim, 2019: 23). Jika dibandingkan dengan daerah perkotaan, desa menunjukkan

tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang lebih rendah. Sekalipun desa telah mengalami pembangunan, masih banyak masyarakat yang belum berkembang jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk memberdayakan dan memperkuat masyarakat desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan. Di Kecamatan Borobudur, Desa Karangrejo telah diakui sebagai desa wisata berkelanjutan karena kepemilikan potensi serta inisiatif pembangunan yang telah dilakukan, termasuk pendirian Balai Ekonomi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiki Hardiyanti, Hartuti Purnaweni, dan Sundarso (2020) yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Balkondes Kabupaten Magelang” dengan menggunakan teori tiga tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) ditemukan fenomena pada tahap penyadaran bahwa masing-masing balkondes telah menyadari masing-masing potensi desanya dan untuk kemudian menjadi ciri khas serta produk utama setiap balkondes. Namun, masih terdapat beberapa balkondes yang memiliki persamaan ciri khas atau produk unggulan. Selain itu, tidak semua masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaannya mendukung keberlangsungan balkondes saja sehingga kenaikan pendapatan masyarakat bergantung pada partisipasi masyarakat.

Selain itu, terkait *Memorandum of Understanding* (MoU) Balkondes masih belum selesai disepakati oleh pihak-pihak terkait, dimana saat ini baru sebatas BAST (Berita Acara Serah Terima) saja (Filia dan Alfirdaus, 2020). Ketidakpastian

mengenai kesepakatan para pihak terkait menjadi tercipta dalam program ini. Selain itu, pendapatan yang diterima dari Balkondes menjadi kekhawatiran utama dalam MoU ini. Meskipun balkondes dibangun pada tahun 2017, tidak adanya Nota Kesepahaman (MoU) menimbulkan kemungkinan munculnya masalah baru. Misalnya, para pemangku kepentingan dapat menolak untuk bekerja sama dengan pihak BUMN Sponsor atau pemerintah desa, yang dapat menyebabkan kerugian karena masyarakat masih terlalu bergantung pada bantuan dari luar untuk mengelola balkondes. Selama kunjungan, terlihat bahwa hanya sejumlah masyarakat yang secara aktif tertarik untuk mempromosikan keberlanjutan Balkondes, karena tidak semua ikut terlibat. Dari uraian tersebut terbukti bahwa dalam tahap pemberian daya, masyarakat belum mumpuni untuk menjadi masyarakat yang mandiri dalam mengelola balkondes karena sejak awal masih ada campur tangan pemerintah yang sangat berpengaruh dan hanya sebagian masyarakat yang turut berpartisipasi.

Selanjutnya, pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zubaidah Nur Oktafiarni dengan judul “Komunikasi Pemberdayaan Pemerintah Desa Wisata Karangrejo Borobudur Magelang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (2022), permasalahan yang muncul, antara lain belum maksimalnya penerapan keterampilan dalam pemberdayaan. Sebagai contoh, hanya sebagian kecil dari masyarakat yang tertarik untuk mengikuti program pemberdayaan, dan sulit untuk mengubah pemikiran masyarakat untuk bergerak maju. Masyarakat juga hanya dilatih dalam keterampilan produksi kerajinan tangan dan tidak dilatih dalam pemasaran produk dalam skala besar.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara saat penulis melakukan survei pra-penelitian, ditemukan fenomena-fenomena dalam pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo. Fenomena-fenomena yang ditemukan, yaitu rendahnya mutu sumber daya manusia yang berakibat pada kesadaran masyarakat tentang pengembangan pariwisata juga masih rendah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Supervisor Balkondes Karangrejo, Yuspika Maharani, bahwa pengembangan kualitas sumber daya manusia secara intensif hanya dilakukan pada awal pembangunan Balkondes Karangrejo saja. Kemudian, ia juga menuturkan bahwa tahap awal pemberdayaan kepada masyarakat desa melalui Balkondes Karangrejo salah satunya adalah pelaksanaan perekrutan pegawai, di mana didominasi oleh pemuda-pemuda asli Desa Karangrejo. Namun, hal tersebut terbukti bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo sendiri belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga partisipasi masyarakatnya sendiri dapat dikatakan masih rendah.

Berikut adalah data jumlah penduduk Desa Karangrejo tahun 2023 jika dilihat berdasarkan jenis pekerjaannya, di mana penduduk yang tidak atau belum bekerja atau pensiunan atau mengurus rumah tangga memiliki jumlah penduduk paling banyak apabila dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya, yakni sebanyak 865 orang. Kondisi tersebut kemudian semakin diperparah ketika pandemi Covid-19 melanda, sebagian besar penduduk Desa Karangrejo kehilangan mata pencahariannya yang mengakibatkan peningkatan angka pengangguran. Data tersebut mendukung pernyataan bahwa belum semua masyarakat di Desa Karangrejo ikut berpartisipasi dalam Balkondes Karangrejo.



**Tabel 1.6 Penduduk Desa Karangrejo Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2023**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/ Tidak Bekerja/ Mengurus Rumah Tangga/ Pensiunan	865
2.	Pelajar/ Mahasiswa	508
3.	PNS/ TNI/ Kepolisian RI	40
4.	Perdagangan/ Pedagang	240
5.	Petani/ Pekebun/ Peternak/ Perikanan	284
6.	Karyawan Swasta	363
7.	Karyawan BUMN/ BUMD/ Honorer	9
8.	Buruh/ Pembantu Rumah Tangga	316
9.	Dosen/Guru	24
10.	Wiraswasta	119
11.	Lainnya	69
<b>Total</b>		<b>2.837</b>

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Karangrejo, 2023.

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Karangrejo, Triyantoro, yang mengungkapkan kelemahan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo, yakni terletak pada sistem manajemennya. Belum adanya perencanaan dalam jangka waktu secara pasti dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Selama ini, tahapan pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo masih berprinsip pada "*learning by doing*". Selain itu, kondisi infrastruktur dan lingkungan fisik masih menjadi kendala pada pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo. Kondisi jalan atau akses menuju Balkondes Karangrejo belum bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan bermuatan besar, seperti bus besar. Hal ini berdampak pada terhambatnya tahapan pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo karena akan menurunnya jumlah pengunjung dan tidak sedikit yang membatalkan perjalanannya untuk mengunjungi Balkondes

Karangrejo. Dari beberapa fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini harapannya dapat menjadi sumber atau panduan studi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, penelitian ini juga harapannya mampu berkontribusi bagi teori administrasi publik dan manajemen publik dalam rangka melakukan perbandingan teori yang digunakan dengan hal yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga dapat menghasilkan saran pola pikir dan menambah pengetahuan, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Setiap organisasi atau pihak yang terlibat diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini, antara lain:

#### **1.4.2.1 Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini harapannya mampu memperkaya ilmu pengetahuan serta mendalami ilmu terkait administrasi publik dan manajemen publik, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama proses perkuliahan, salah satunya menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh suatu

organisasi sektor publik atau organisasi pemerintah daerah (OPD).

#### **1.4.2.2 Bagi Pemerintah Desa**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyumbang bahan pertimbangan, bahan evaluasi, bahan masukan, dan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat dengan tepat dan optimal dan untuk dimanfaatkan sebagai bahan dalam merumuskan suatu kebijakan di masa depan agar lebih efektif dan dapat memberikan dampak positif.

#### **1.4.2.3 Bagi Masyarakat Desa**

Hasil penelitian ini harapannya mampu menambah wawasan masyarakat menjadi lebih luas untuk berpartisipasi pada program pemberdayaan yang sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan kemandirian dan berdaya saing tinggi.

#### **1.4.2.4 Bagi Perguruan Tinggi**

Hasil penelitian ini harapannya mampu dimanfaatkan sebagai pedoman dan studi kepustakaan bagi penulis lain dan untuk menambah bahan pembelajaran serta penerapan ilmu pengetahuan, terutama pada ilmu administrasi publik dan manajemen publik.

#### **1.4.2.5 Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian harapannya mampu digunakan sebagai informasi dan alternatif rujukan literatur dengan pedoman bacaan bagi penulis lain dengan tema yang sama serta sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi, lembaga, atau instansi lainnya yang sedang menghadapi masalah yang sama.

### **1.5 Kajian Teori**

#### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Suatu riset yang dilakukan di masa lampau dan digunakan sebagai rujukan untuk menunjang teori dalam kajian penelitian disebut sebagai penelitian terdahulu. Berdasarkan studi kepustakaan penulis, penelitian ini bersifat baru karena belum ada penelitian serupa sebelumnya, akan tetapi terdapat beragam penelitian terdahulu yang relevan, seperti pada Tabel 1.7.

**Tabel 1.7 Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Hardiyanti, K., Purnaweni, H., dan Sundarso, S. 2020.	Melakukan analisis strategi pemberdayaan masyarakat pada 20 Balkondes di Kecamatan Borobudur.	Tahapan teori pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) diterapkan dalam penelitian ini, meliputi tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan ( <i>capacity building</i> ), dan tahap pemberian daya.	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi kepustakaan.	Didasarkan pada tiga tahap pemberdayaan, tahap penyadaranberupaya untuk memeriksa potensi masing-masing desa dengan mengidentifikasi ciri khas dan produk utama di setiap balkondes. Meskipun demikian, sejumlah balkondes memiliki permsamaan produk unggulan dan ciri khas. Selanjutnya, tahap pengkapasitasan adalah ketika sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan hanya untuk pemerintah desa, sehingga kecil kemungkinannya masyarakat akan mengenali potensi desa. Terakhir, pendayaan berupaya agar masyarakat dapat mengelola balkondes secara mandiri, namun masih terdapat pengaruh dari atas ke bawah yang cukup signifikan.
2.	Suyanto., dan Aditya, R. 2021.	Melakukan analisis strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Wringinputih.	Teori Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dari Sulistyani (2004), yaitu tahapan transformasi kesadaran, peningkatan	Dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi sebagai metode	Strategi yang dilakukan oleh Balkondes Wringinputih berupa transformasi kesadaran, pengembangan kapasitas, dan peningkatan kemampuan. Transformasi kesadaran dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai acara. Pengembangan kapasitas dengan mengikut sertakan masyarakat dalam acara pelatihan-pelatihan. Peningkatan kemampuan dengan

No.	Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
			kapasitas, dan peningkatan kapasitas intelektual, diterapkan dalam penelitian ini.	pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif.	memberikan kesempatan masyarakat untuk memberikan pendapat. Balkondes juga dijadikan sebagai etalase kearifan lokal yang ada di Desa Wringinputih, selain itu juga dijadikan tempat mempromosikan produk unggulan desa.
3.	Naibaho, W., Nurcahyanto, H., dan Marom, A. 2023.	Melakukan analisis upaya beserta faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kandri di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.	Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto (2003:100), terdiri dari bina kemanusiaan, bina usaha, bina lingkungan, dan bina lembaga.	Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan.	Secara umum, keempat indikator pemberdayaan , yang sebagian besar didorong oleh bina usaha telah dipenuhi oleh upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kandri. Selain itu, terdapat tren yang baik dalam perekonomian masyarakat Desa Wisata Kandri berkat pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, termasuk kurangnya infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya manusia serta lingkungan fisik yang kurang mendukung.
4.	Ha, R.F.E., Nurcahyanto, H., dan Marom, A.	Melakukan analisis tahapan pemberdayaan masyarakat beserta faktor	Penelitian ini menggunakan teori Tahapan Pemberdayaan Masyarakat yang	Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif,	Meskipun belum sampai pada titik kemandirian dan keberdayaan, pemahaman masyarakat akan potensi dan permasalahan di wilayahnya sudah terpetakan berkat adanya kampung tematik industri rumah tangga.

No.	Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
		penghambatnya di Kampung Tematik <i>Home Industry</i> Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang.	dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.	dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Namun, masih terdapat kendala di setiap tahapan proses pemberdayaan, termasuk struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi.
5.	Mas'ud, M.F., dan Maesaroh. 2020.	Melakukan analisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Kulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri beserta faktor pendorong dan penghambat.	Penelitian ini menggunakan teori Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dari Dwidjowijoto dan Wrihatnolo (2007:2), meliputi tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayagunaan.	Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan, wawancara dan observasi.	Oleh karena masyarakat masih mementingkan pembangunan infrastruktur, kegiatan peningkatan kapasitas yang tidak berkelanjutan, dan kemampuan teknologi informasi masyarakat yang masih terbatas, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh komunikasi yang kurang intensif, sumber daya manusia yang kurang mendukung inisiatif pemberdayaan masyarakat, dan fungsi teknologi yang masih terbatas.



No.	Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
6.	Rahmah, G.A., dkk. 2022.	Melakukan analisis proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Pulau Besing, Kabupaten Berau.	Penelitian ini menggunakan teori Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dari Dwidjowijoto dan Wrihatnolo (2007:2), meliputi tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.	Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Pulau Besing Kabupaten Berau menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pariwisata semakin meningkat, terbukti dengan adanya tahap penyadaran dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat di Pulau Besing. Selanjutnya, pada tahap pendayaan dengan diberikan daya berupa pendampingan dalam bentuk pelatihan pemandu wisata, perencanaan, dan pengelolaan ekonomi kreatif, maka kemandirian dan kreatifitas akan berkembang.
7.	Achmad, W., dkk. 2023.	Melakukan analisis pertumbuhan Desa Wisata Cisaat di Kabupaten Subang, Jawa Barat melalui model pemberdayaan masyarakat lokal.	Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat dari Harahap (2012), meliputi <i>enabling setting</i> , memberdayakan masyarakat sekitar, dan dukungan sosial-politik.	Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Program pemberdayaan masyarakat di Desa Cisaat, Kabupaten Subang dilihat dari terpenuhinya tiga aspek, yaitu jangkauan akses pemberdayaan, tingkat partisipasi masyarakat, dan pengawasan desa wisata. Pemberdayaan ini telah terbukti memberikan manfaat, meskipun terdapat kendala yang dihadapi, seperti kondisi geografis yang rawan bencana, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

No.	Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
8.	Setyowati, A.D., dkk. 2023.	Melakukan analisis proses pemberdayaan masyarakat terkait kerajinan iboni eceng gondok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Desa Rowoboni.	Penelitian ini menggunakan teori Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dari Mardikanto dan Soebiato (2017), antara lain pembentukan kesadaran dan perilaku; transformasi pengetahuan dan keterampilan; dan pengayaan atau peningkatan intelektual dan keterampilan.	Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.	Proses pemberdayaan masyarakat pengrajin iboni di Desa Rowoboni meliputi tiga tahapan, antara lain tahap penyadaran dan terbentuknya sikap melalui komunikasi dialogis kepada masyarakat; transformasi pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan kelompok, dan pelatihan mandiri dengan pengelola kerajinan iboni; dan pengayaan atau peningkatan intelektual dan keterampilan, di mana tenaga kerja mulai berproduksi secara mandiri mengikuti permintaan konsumen. Dampak ekonomi dari program pemberdayaan ini adalah peningkatan pendapatan keluarga yang dapat memberikan sumber pendapatan kedua bagi keluarga.
9.	Adiatmika, I.W.W., dan Nain, U. 2022.	Melakukan analisis aspek pemberdayaan masyarakat beserta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam	Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat dari Mardikanto dan Soebiato (2017),	Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan	Program bank sampah di Kabupaten Tabanan, yang mempromosikan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah, telah beroperasi dengan sangat baik. Hal tersebut di atas ditunjukkan oleh inisiatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, melalui

No.	Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
		pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah di Kabupaten Tabanan.	yang mana terdapat empat aspek, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan.	data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. Inisiatif tersebut meliputi program edukasi dan sosialisasi, pembinaan, dan dukungan bagi pengelola bank sampah dan masyarakat terkait pengelolaan sampah berbasis sumber dan pelestarian lingkungan.
10.	Raehani., Riadi, S., dan Samad, M.A. 2019	Melakukan analisis proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sakita, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.	Penelitian ini menggunakan teori Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dari Elliot (1996), yaitu pendekatan kesejahteraan, pendekatan pembangunan, dan pendekatan pemberdayaan.	Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Berdasarkan aspek pendekatan kesejahteraan masyarakat Desa Sakita dinilai sudah baik. Meskipun ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sakita belum merata, namun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilakukan oleh perangkat desa. Kemudian, pendekatan pembangunan di Desa Sakita juga sudah baik, meskipun masyarakat terkadang mengeluh dan merasa belum berdaya dalam hal pembangunan dan kurangnya sosialisasi atau informasi dari pembangunan desa.

Sumber: diolah dari berbagai jurnal, 2023.

Penelitian terdahulu telah memberikan ide untuk penelitian ini, sesuai dengan sumber jurnal yang tercantum dalam Tabel 1.6. Meskipun tujuan dari program pemberdayaan masyarakat Balkondes Karangrejo adalah untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera, namun hasil dari program tersebut tidak selalu berdampak signifikan. Manfaat yang dihasilkan dari pemberdayaan masyarakat tersebut masih belum dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat menjadi bahan pembelajaran dan pembeda dalam penelitian ini. Pada jurnal penelitian terdahulu mayoritas membahas pemberdayaan masyarakat yang ditinjau dari segi aspek atau komponen keberhasilan dan upaya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meskipun jurnal penelitian terdahulu hanya fokus membahas konsep analisis pemberdayaan masyarakat, namun sedikit sekali yang juga membahas faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan tahapan pemberdayaan masyarakat, meliputi tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat, maka penelitian ini berfokus untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo.

### 1.5.2 Administrasi Publik

Hebert A. Simon (dalam Pasolong, 2014: 2) menjabarkan bahwa administrasi merupakan kegiatan suatu komunitas yang bekerja sama guna tercapainya sebuah tujuan bersama. Kegiatan ini berbentuk kerja terorganisir dan terencana yang dilakukan oleh sejumlah individu atau sekelompok individu yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas. Kemudian, definisi publik menurut Syafi'i (dalam Pasolong, 2014: 6) adalah sekumpulan orang yang memiliki persamaan cara pikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan secara baik yang dilandaskan pada norma dan nilai yang dianut. Adapun, administrasi publik didefinisikan oleh Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) sebagai proses pengorganisasian dan pengkoordinasian sumber daya dan personil publik untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengatur sejumlah keputusan kebijakan publik.

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu ditujukan guna menyelesaikan permasalahan publik melalui sebuah pembangunan, khususnya pada bidang keuangan, sumber daya, dan organisasi. Barton & Chappel (dalam Keban, 2014: 5) mendefinisikan administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dijalankan oleh pemerintah, sedangkan, Banga memiliki pendapat bahwa administrasi publik adalah runtutan kegiatan yang

meliputi perumusan, pengimplemetasian, dan pengevaluasian kebijakan dengan sangkil dan mangkus guna mencapai tujuan negara (Banga, 2018: 85). Selain mendorong kebijakan publik agar lebih peka terhadap kepentingan publik, Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:6) memberikan batasan bahwa administrasi publik adalah perpaduan yang rumit antara teori dan praktik yang berkaitan dengan pemahaman fungsi pemerintah dalam hubungannya dengan publik.

Selanjutnya, Keban (2014) memiliki pandangan terhadap bidang administrasi publik yang berpusat pada peran ganda pemerintah sebagai fasilitator dalam hal-hal strategis dan regulator dalam pengambilan keputusan dan pemberian layanan. Hal tersebut didasarkan alasan bahwa pemerintah dinilai lebih mengetahui persoalan yang ada dibandingkan masyarakat dan pemerintah berperan sebagai penyedia dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Selain itu, administrasi publik juga dianggap sebagai upaya pengembangan praktik-praktik manajemen sehingga menjadi sangkil dan mangkus dalam pemenuhan kebutuhan publik. Jadi, administrasi publik dapat didefinisikan sebagai kerja sama sekelompok individu atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan mengelola atau melayani kepentingan publik secara efektif dan efisien. Definisi ini didasarkan pada sejumlah definisi yang diberikan oleh para ahli.

### 1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Pandangan Thomas Kuhn (dalam Pasolong, 2014: 27) terhadap paradigma adalah seperangkat keyakinan, prosedur, gagasan fundamental, atau pendekatan terhadap pemecahan persoalan yang diterima oleh publik pada waktu tertentu. Berikut adalah paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2014: 28):

(1) Paradigma 1 (1900 – 1926) disebut sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Penulis paradigma ini, Frank J. Goodnow dan Leonard D. White, menyatakan dalam esai mereka pada tahun 1900, "*Politics and Administrations*" bahwa administrasi harus memperhatikan pelaksanaan kebijakan atau kehendak rakyat, sementara politik harus berkonsentrasi pada kebijakan atau ekspresi kehendak rakyat. Politik dan administrasi harus dipisahkan, terbukti dengan adanya pemisahan antara badan legislatif yang bertugas menyuarakan keinginan rakyat dengan badan eksekutif yang akan melaksanakan kehendak rakyat yang telah disuarakan, sedangkan lembaga yudikatif dalam hal ini bekerja sama dengan lembaga legislatif untuk menetapkan tujuan dan membuat kebijakan yang tepat untuk setiap keinginan rakyat yang telah berhasil disuarakan. Paradigma ini menyiratkan bahwa

administrasi adalah sistem yang bebas nilai yang diberlakukan untuk memenuhi standar ekonomi dan efisiensi yang berasal dari birokrasi pemerintah. Paradigma ini hanya menekankan pada aspek “lokus”, yaitu *government bureaucracy*, tetapi fokusnya kurang dibahas secara jelas dan rinci.

(2) Paradigma 2 (1927 – 1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Para tokohnya, Willoughby, Gullick dan Urwick, terpengaruh oleh ide-ide pemikir manajemen tradisional seperti Fayol dan Taylor. Dengan pembenaran bahwa prinsip-prinsip ini bersifat universal, mereka menyajikan prinsip-prinsip POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) sebagai pusat administrasi publik. Fokus lebih besar dibandingkan dengan lokus dalam paradigma ini, yang tidak dinyatakan sama sekali atau tidak dinyatakan secara jelas.

(3) Paradigma 3 (1950 – 1970) disebut sebagai paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Morstein Mark dan Herbert Simon mengarahkan kritik bahwa administrasi publik tidak bebas nilai. Hal ini disebabkan karena ilmu politik dipandang sebagai disiplin ilmu yang mendominasi bidang administrasi publik. Berbeda dengan Herbert Simon yang berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam prinsip-prinsip administrasi yang universal, Morstein Marx berpendapat



bahwa politik dan administrasi sulit untuk dipisahkan atau dibedakan karena administrasi negara juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pada paradigma ketiga, ilmu politik cenderung menjadi pusat perhatian, dan hampir menghapus identitas ilmu administrasi publik. Akibatnya, berkembanglah paradigma yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dengan birokrasi pemerintah sebagai lokusnya, sehingga mengaburkan garis pemisahannya.

(4) Paradigma 4 (1956 – 1970) disebut sebagai Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Menurut paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen dibuat secara menyeluruh dan ilmiah. Konsentrasi paradigma ini adalah pada perilaku organisasi, analisis manajemen, penggunaan teknologi kontemporer, termasuk metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan sebagainya, meskipun lokusnya tidak jelas.

(5) Paradigma 5 (1970 – sekarang) disebut sebagai paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Fokus dan lokus paradigma ini sangat jelas. Kebijakan publik, teori manajemen, dan teori organisasi sebagai fokusnya, sedangkan kepentingan dan masalah publik menjadi lokusnya.

(6) Paradigma 6 (1990 – sekarang) merupakan paradigma terakhir yang disebut sebagai *Good Governance*. Paradigma yang

pertama kali muncul pada tahun 1990-an ini sangat penting karena merupakan paradigma baru. Sederhananya, banyak orang percaya bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya melibatkan sektor publik saja, tetapi juga dua aktor lainnya: masyarakat dan sektor swasta. Oleh karena itu, Putra Teddy M. (2019: 35) menegaskan bahwa untuk memahami tata kelola pemerintahan yang efektif, diperlukan pemahaman tentang bagaimana masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintah (birokrasi) mengintegrasikan tugas-tugas mereka dengan cara yang disepakati bersama.

Penelitian ini termasuk dalam paradigma keenam, atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada paradigma administratif yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan pemberdayaan melibatkan partisipasi masyarakat serta peran pemerintah dan pihak swasta dalam memberikan tanggung jawab sosialnya untuk dapat mengelola pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berkelanjutan dan tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

#### **1.5.4 Manajemen Publik**

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, manajemen adalah proses pengorganisasian, perencanaan, kepemimpinan, dan pengaturan pekerjaan para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber daya organisasi

lainnya, demikian menurut Stoner dan Wankel (dalam Pasolong, 2014: 82). Kemudian, Henry Simamora (dalam Pasolong, 2014:83) juga memberikan pemikirannya mengenai manajemen, yang ia definisikan sebagai tindakan mempekerjakan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi manajemen diperjelas lagi oleh Shafritz dan Russell (dalam Keban, 2014:92), yang mengaitkan manajemen dengan individu-individu yang bertanggung jawab untuk mengelola suatu organisasi serta proses mengelola organisasi, yaitu pemanfaatan sumber daya (manusia dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi ini mencakup sekelompok individu yang bertugas menjalankan proses serta metode untuk mencapai tujuan.

Empat prinsip dasar administrasi publik disebutkan oleh Wilson (dalam Pasolong, 2007: 96) dalam kaitannya dengan manajemen publik. Keempat prinsip tersebut adalah: (1) pemerintah sebagai *setting* utama organisasi; (2) fungsi eksekutif sebagai fokus utama; (3) pencarian prinsip-prinsip dan teknik-teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci untuk mengembangkan kompetensi administratif; dan (4) metode perbandingan sebagai metode penelitian untuk kemajuan bidang administrasi publik. Pandangan Wilson memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya-upaya yang dilakukan saat ini untuk membangun manajemen publik.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa manajemen publik adalah proses para manajer publik di lembaga-lembaga pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, sesuai dengan arahan kebijakan publik. Hubungan antara manajemen publik dan pemberdayaan masyarakat serupa dengan hubungan antara keterampilan organisasi manajer dalam pengorganisasian, di mana pemberdayaan adalah proses di mana pemerintah menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mengelola dan mengorganisir masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **1.5.5 Pemberdayaan Masyarakat**

Definisi pemberdayaan menurut Mas'ood, seperti yang dinyatakan dalam Mardikanto dan Soebiato (2019: 26), adalah upaya untuk memperkuat atau memampukan masyarakat. Definisi lain dari pemberdayaan adalah upaya untuk memenuhi tuntutan orang, kelompok, dan masyarakat agar mereka dapat mengelola lingkungannya dan membuat keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang terkait dengan pekerjaan, kehidupan sosial, dan kegiatan-kegiatan lainnya (Mardikanto dan Soebiato, 2019: 28). Kemudian dari makna tersebut, Mardikanto dan Soebiato (2019) melihat pemberdayaan melalui tiga aspek, yaitu:

- 1) *Enabling setting*

*Enabling setting* adalah membina lingkungan atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk mencapai potensi penuhnya. Oleh karena itu, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengidentifikasi serta memanfaatkan potensi yang sudah ada menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pelaksana pemberdayaan.

2) *Empowering local community*

*Empowering local community* adalah meningkatkan potensi atau kekuatan masyarakat melalui langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyediakan berbagai masukan dan memberikan akses ke berbagai kemungkinan, sehingga masyarakat dapat berdaya. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan penguatan individu, tetapi juga seluruh institusi masyarakat.

3) *Socio-political support*

*Socio-political support* adalah memberdayakan juga diartikan sebagai tindakan untuk mencegah persaingan buruk dan penggunaan pihak yang kuat untuk melawan pihak yang lebih lemah. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan suatu bentuk pembelaan dan keberpihakan pada pihak yang lemah. Dalam konteks ini, pemberdayaan mengacu pada upaya untuk memberikan kesempatan, sumber daya, dan dukungan sosial-politik yang memadai untuk pengembangan masyarakat lokal.

Pada hakikatnya, pemberdayaan masyarakat mengharuskan masyarakat untuk menghasilkan sesuatu sendiri, tidak membuat mereka bergantung pada berbagai upaya amal. Hal ini selaras dengan pandangan Ardito (dalam Subejo dan Supriyanto, 2004) bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan kapasitas dan kemandirian kepada masyarakat lokal dalam hal ekonomi, geografi, dan sosial dengan memberdayakan mereka untuk merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya melalui tindakan kolektif. Dengan demikian, untuk menuju kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan, kemandirian dan kapasitas masyarakat merupakan dua hal yang harus dicapai.

Pemberdayaan masyarakat juga berarti bahwa masyarakat harus diikutsertakan dalam proses pembangunan sehingga mereka dapat mengambil inisiatif untuk mengubah keadaan mereka (Maryani dan Nainggolan, 2019). Kemudian, Slamet (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019: 100) mengungkapkan bahwa melalui proses pembelajaran kolektif, pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan ekonomi, sosial, dan politik yang berupaya meningkatkan dan memberdayakan potensi masyarakat. Proses ini juga bertujuan untuk mewujudkan perubahan perilaku pada keterlibatan individu, kelompok, atau lembaga pada proses pembangunan, sehingga tercapainya kesejahteraan berkelanjutan serta kehidupan lebih berdaya, mandiri, dan partisipatif. Jadi,

pemberdayaan masyarakat melibatkan upaya-upaya individu dan kolektif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memenuhi tuntutan-tuntutan sosial dan ekonomi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Istilah “pemberdayaan” mengacu pada upaya untuk meningkatkan, terutama aspek fisik, mental, ekonomi, dan sosial budaya dari kehidupan manusia. Hal ini merupakan implikasi dari pendekatan pembangunan yang berfokus pada masyarakat, yang merupakan strategi pembangunan berbasis masyarakat. Mardikanto (dalam Maryani dan Nainggolan, 2019: 8) menjabarkan enam tujuan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai ketiga jenis kemajuan tersebut, antara lain:

- 1) Perbaiki kelembagaan, seperti perbaikan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan akan mempengaruhi bagaimana masyarakat berpartisipasi dan seberapa baik mereka berfungsi jika mereka memiliki visi, misi, tujuan, target yang terukur, dan program kerja yang terarah. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam organisasi perlu berkontribusi, saling mendukung, dan menyumbangkan sumber daya yang mereka miliki, termasuk waktu, keahlian, pengetahuan, dan keterampilan;
- 2) Perbaiki usaha, yaitu mampu memenuhi persyaratan semua pihak yang terlibat dengan tetap menawarkan manfaat bagi

masyarakat luas. Perbaikan kelembagaan merupakan prasyarat untuk perbaikan usaha;

- 3) Perbaikan pendapatan, yaitu peningkatan yang akan membantu anggota lembaga untuk menghasilkan lebih banyak uang. Peningkatan pendapatan adalah pendapatan yang lebih besar;
- 4) Perbaikan lingkungan, meliputi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kesadaran akan kekhasan wilayah sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan. Contohnya adalah menata kawasan kumuh atau meningkatkan penghijauan di daerah sekitar. Perbaikan lingkungan fisik dan sosial juga berdampak pada pendapatan;
- 5) Perbaikan kehidupan, dapat dilihat dari sejumlah ukuran, termasuk pendapatan, pendidikan, dan kesehatan setiap keluarga. Peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh perbaikan kualitas hidup sehingga dapat memperbaiki kondisi keluarga atau masyarakat; dan
- 6) Perbaikan masyarakat, yaitu lingkungan sosial dan fisik meningkatkan kualitas hidup dengan memungkinkan kehidupan kelompok masyarakat yang lebih baik.

Kemudian, terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat, antara lain (Najiyati, 2005: 54):

- 1) Kesetaraan



Prinsip yang mengedepankan kedudukan yang sama rata, baik antargender maupun antara lembaga dengan masyarakat yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan melalui mekanisme saling berbagi pengalaman, ilmu pengetahuan, dan keahlian. Artinya, di antara pihak-pihak yang ikut terlibat tidak ada yang mendominasi, di mana tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada penguasa atau yang dikuasai, atau tidak ada pembina atau yang dibina. Prinsip kesetaraan sendiri, yaitu saling mengakui kelebihan dan kekurangan antara satu pihak dengan pihak lainnya sehingga masing-masing pihak dapat melakukan evaluasi.

## 2) Partisipatif

Prinsip partisipatif adalah prinsip yang mendorong kemandirian yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dinilai oleh masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan waktu dan program pendampingan dengan mentor yang sungguh-sungguh mengabdikan diri pada pemberdayaan masyarakat untuk mencapai titik ini.

## 3) Keswadayaan

Prinsip kemandirian adalah prinsip yang mengedepankan kemampuan masyarakat untuk tidak bergantung pada bantuan dari luar. Prinsip ini didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat sangat memahami keterbatasan

usaha mereka, sadar akan lingkungan mereka, memiliki tenaga dan kemauan untuk bekerja, dan memiliki norma-norma sosial yang harus diikuti. Bantuan materi dari pihak lain perlu dipandang sebagai dukungan agar jumlah swadaya tidak berkurang. Sementara itu, sangat penting untuk menyusun strategi bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas, dengan tujuan akhir untuk mengembalikan pengelolaan kepada masyarakat yang telah berhasil mengorganisir diri mereka sendiri untuk mengatasi tantangan mereka.

#### 4) Berkelanjutan

Prinsip berkelanjutan merupakan prinsip yang disusun agar program pemberdayaan dapat berkesinambungan meskipun peran pendamping lebih dominan dibandingkan masyarakat sendiri pada awalnya. Akan tetapi semakin lama akan berkurang peran pendamping tersebut, bahkan dapat terjadi penghapusan karena masyarakat telah mandiri.

Berbeda dengan Najiyati (2005) yang mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, Mardikanto dan Soebiato (2019) mengemukakan pendapatnya mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan, antara lain:

- 1) Mengerjakan, artinya masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan karena dengan

demikian mereka akan merasakan proses belajar yang akan melekat dalam jangka waktu lama;

- 2) Akibat, artinya masyarakat wajib merasakan dampak dari kegiatan pemberdayaan, karena hal ini akan mempengaruhi semangat mereka untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang akan datang; dan
- 3) Asosiasi, artinya masyarakat harus mengaitkan kegiatan yang memberdayakan yang dikombinasikan dengan kegiatan tambahan karena hal ini merupakan cara yang umum dilakukan oleh masyarakat untuk menghubungkan kegiatan mereka.

Praktik pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan umumnya memiliki batasan pada pemberdayaan ekonomi guna menanggulangi kemiskinan. Maka dari itu, menciptakan usaha yang menguntungkan untuk meningkatkan pendapatan adalah cara yang umum dilakukan saat pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan pernyataan tersebut, Sumadyo (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019: 113) merumuskan Tri Bina sebagai upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Namun, Mardikanto (2019) menambahkan Bina Kelembagaan karena menjadi urgensi guna mendukung efektivitas dari beberapa lembaga yang dibutuhkan.

- a) Bina Manusia

Bina manusia merupakan komponen penting dalam pemberdayaan masyarakat karena mencakup semua upaya yang bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan kemampuan. Upaya-upaya ini meliputi:

- (1) Pengembangan kapasitas individu, meliputi kapasitas pengembangan kepribadian, kemampuan di lingkungan kerja, dan pengembangan keprofesionalan;
- (2) Pengembangan kapasitas entitas atau kelembagaan, meliputi kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi; kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi; proses atau manajemen organisasi; pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya; interaksi antarindividu dalam organisasi; serta interaksi organisasi dengan para pemangku kepentingan lainnya; dan
- (3) Pengembangan kemampuan sistem (jejaring), mencakup pertumbuhan kontak antarorganisasi, baik di dalam maupun di luar sistem.

b) Bina Usaha

Setiap upaya pemberdayaan harus mencakup bina usaha karena pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan baik jika bina manusia sebelumnya tidak memberikan pengaruh atau manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan. Namun, bina usaha akan

menerima bantuan dalam bentuk keterlibatan masyarakat jika bina manusia dapat mempengaruhi atau meningkatkan kesejahteraan. Bina usaha mencakup berbagai aspek, seperti memilih produk dan model bisnis; melakukan studi kelayakan dan perencanaan bisnis; membuat badan usaha; mengatur investasi dan mengidentifikasi sumber pendanaan; mengelola sumber daya manusia dan pengembangan karier; mengelola produksi, operasi, logistik, dan keuangan; melakukan penelitian dan pengembangan; membuat dan mengawasi sistem informasi bisnis; membentuk kemitraan dan jaringan; serta mengembangkan dukungan sarana dan prasarana.

c) Bina Lingkungan

Isu lingkungan menjadi semakin penting dalam setiap kegiatan dengan adanya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Pelestarian lingkungan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan suatu kegiatan. Namun, istilah lingkungan secara tradisional terutama digunakan untuk merujuk pada lingkungan fisik, seperti pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Namun, dalam kehidupan nyata, lingkungan sosial memainkan peran penting dalam mendorong berbagai aktivitas. Oleh karena itu, hal ini mendorong pemahaman tentang bagaimana bisnis dapat mengembangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, tanggung

jawab sosial mengacu pada kewajiban bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang terkena dampak negatif dari operasi bisnis. Di sisi lain, tanggung jawab lingkungan mencakup tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan komitmen keuangan dan operasional terkait pertahanan, konservasi, dan restorasi (rehabilitasi atau reklamasi) lingkungan dan sumber daya alam.

d) Bina Kelembagaan

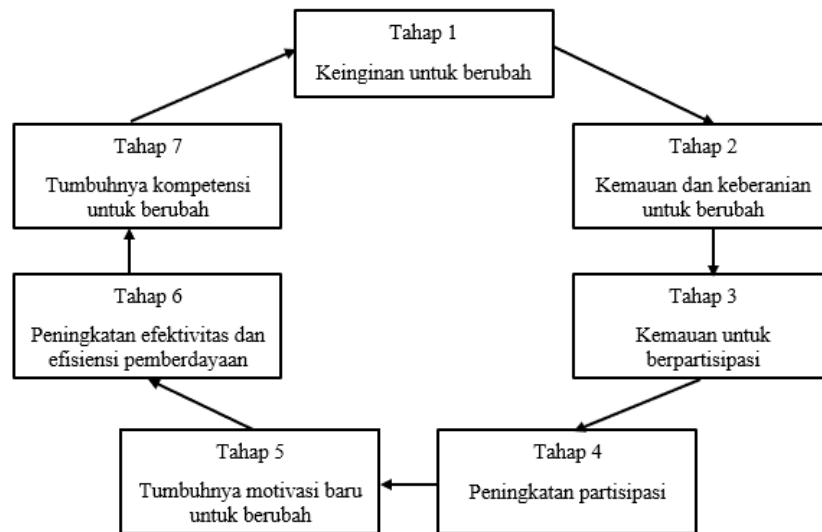
Keberhasilan bina usaha, bina lingkungan, dan bina manusia akan sangat dipengaruhi oleh efektivitas kelembagaan. Meskipun beberapa jenis lembaga (kelompok atau organisasi) terkadang termasuk dalam definisi kelembagaan, namun istilah ini sebenarnya mengacu pada makna yang lebih luas, yakni sebagai sistem norma umum yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Lebih jauh lagi, istilah “lembaga sosial” dan “organisasi sosial” sering digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari untuk merujuk kepada kelembagaan. Secara teori, sebuah interaksi sosial dapat diklasifikasikan sebagai sebuah kelembagaan jika memiliki beberapa elemen, meliputi elemen orang, yang melibatkan identifikasi secara jelas individu-individu yang terlibat di dalam institusi tersebut; elemen kepentingan, yang melibatkan individu-individu yang memiliki tujuan dan kepentingan yang

saling mengikat sehingga dapat berinteraksi satu sama lain; elemen aturan, yang membutuhkan kesepakatan bersama di dalam organisasi tersebut; dan elemen struktur, yang terdiri dari peran dan posisi individu yang dijalankan.

#### **1.5.6 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan digambarkan sebagai sebuah proses, di mana proses itu sendiri memainkan peran penting dalam mengevaluasi pemberdayaan yang dilakukan secara keseluruhan. Untuk mengevaluasi dan memeriksa kondisi pemberdayaan saat ini, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut dapat diimplementasikan atau dievaluasi bergantung pada keadaan, respons masyarakat, dan kapasitas yang dimiliki. Wilson berpendapat bahwa proses pemberdayaan yang dilalui oleh setiap anggota instansi sebagai suatu proses yang terbagi menjadi tujuh rangkaian tahapan (Mardikanto dan Soebiato, 2019: 122).

**Gambar 1.2 Siklus Pemberdayaan Masyarakat**



Sumber: Wilson (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019: 122).

1) Keinginan untuk berubah

Menumbuhkan motivasi seseorang untuk melakukan perubahan dalam hidup mereka adalah tahap pertama menuju pemberdayaan masyarakat. Semua upaya pemberdayaan masyarakat akan gagal jika tidak mendapatkan dukungan, empati, atau keterlibatan masyarakat tanpa adanya motivasi tersebut.

2) Kemauan dan keberanian untuk berubah

Untuk melakukan pemberdayaan dan membawa perubahan serta perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat, tahap kedua adalah mendukung keberanian dan keinginan untuk melepaskan hal-hal yang baik atau hambatan yang dirasakan.



3) Keinginan untuk berpartisipasi

Tanpa partisipasi masyarakat, pemberdayaan tidak akan berhasil. Oleh karena itu, perlu diciptakan kemauan untuk terlibat dalam tindakan pemberdayaan yang memperbaiki kondisi atau menawarkan keuntungan selama tahap ketiga ini.

4) Peningkatan partisipasi

Pada titik ini, terlihat jelas bagaimana inisiatif pemberdayaan masyarakat yang sedang berlangsung akan memperluas peran dan keterlibatan masyarakat yang telah menerima manfaat dari perubahan tersebut.

5) Tumbuhnya motivasi baru untuk berubah

Tahap ini akan menunjukkan peningkatan insentif untuk melakukan perbaikan di masa mendatang karena peran dan keterlibatan masyarakat yang diperluas dalam inisiatif pemberdayaan masyarakat.

6) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan

Sejak masyarakat mulai memahami urgensi pemberdayaan, efektivitas dan efisiensinya telah meningkat pada tahap ini.

7) Tumbuhnya kompetensi untuk berubah

Langkah terakhir ini melibatkan peningkatan kompetensi melalui kegiatan pemberdayaan baru setelah masyarakat secara

sukarela dan aktif terlibat dalam perubahan atau perbaikan melalui pemberdayaan.

Tim Delivery kemudian menjelaskan berbagai tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat (Mardikanto dan Soebiato, 2019: 125). Penjelasan dari masing-masing tahapan ini diberikan di bawah ini:

1) Seleksi lokasi

Lembaga, pihak-pihak terkait, dan masyarakat menyetujui ketentuan-ketentuan yang diikuti ketika memilih lokasi atau wilayah. Penetapan ketentuan ini dianggap penting agar proses pemilihan lokasi dapat berjalan seoptimal mungkin dan memastikan tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

2) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Tujuan dari sosialisasi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dengan menumbuhkan dialog dan komunikasi di antara para pemangku kepentingan yang terkait. Keinginan masyarakat akan terpengaruh untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan, maka proses sosialisasi menjadi cukup signifikan.

### 3) Proses pemberdayaan masyarakat

Tujuan mendasar dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memampukan dan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka melalui proses kolaboratif yang mencakup identifikasi dan evaluasi potensi, masalah, dan peluang yang ada di wilayah tersebut; membuat dan melaksanakan rencana kegiatan kelompok; serta secara rutin dan aktif memonitor proses dan hasil kegiatan.

### 4) Pemandirian masyarakat

Jalan menuju kemandirian masyarakat adalah bantuan untuk mempersiapkan masyarakat agar benar-benar mandiri dalam menjalankan urusannya. Proses pemberdayaan terkait erat dengan faktor eksternal dan internal. Meskipun faktor internal memainkan peran penting dalam memungkinkan masyarakat untuk mengorganisir diri mereka sendiri, elemen eksternal juga memerlukan perhatian. Untuk mendukung proses pemberdayaan, diperlukan tim fasilitator yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Pada awalnya, tim fasilitator memainkan peran yang sangat aktif dalam proses pemberdayaan, namun seiring berjalannya waktu, peran mereka akan berkurang hingga masyarakat dapat menjalankan kegiatannya sendiri.

Di sisi lain, Minarti (2008) juga menggambarkan tahapan pemberdayaan yang terdiri dari:

#### 1) Penyadaran

Tahap penyadaran membantu masyarakat memahami posisinya dalam kaitannya dengan pengaruh lokal atau global seperti teknologi, informasi, budaya, politik, dan modal sosial. Tahap ini melibatkan pengenalan terhadap lingkungan sekitar dan potensi diri sendiri.

#### 2) Pengorganisasian

Pada tahap pengorganisasian, program untuk meningkatkan organisasi diadakan dan organisasi harus dibentuk secara sukarela oleh masyarakat.

#### 3) Kaderisasi

Suatu organisasi menggunakan tahap ini untuk melatih kader-kader pengembangan swadaya masyarakat yang akan melanjutkan peran pendampingan ketika program berakhir. Kader dipilih oleh masyarakat melalui partisipasi.

#### 4) Dukungan Teknis

Proses produksi dengan menggunakan teknologi disebut tahap pemberdayaan dengan dukungan teknis bertujuan untuk meningkatkan proses pemberdayaan yang sedang berlangsung.

#### 5) Pengelolaan Sistem

Tahap yang melancarkan masyarakat untuk memperoleh sesuatu hal yang mereka butuhkan, baik secara individu maupun kolektif, dikenal sebagai pengelolaan sistem.

Pemberdayaan adalah sebuah proses mengubah sesuatu menjadi berdaya, di mana dalam prosesnya terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Artinya, pemberdayaan bukanlah sebuah proses yang instan, yang mana sebagai proses, pemberdayaan memiliki tiga tahapan (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007: 3-6), antara lain tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

#### 1) Penyadaran

Pada tahap ini, sasaran pemberdayaan mendapatkan “pencerahan” berupa pemahaman bahwa mereka memiliki alat yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Jika kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah kelompok masyarakat miskin, mereka diberitahu bahwa mereka dapat menjadi sejahtera jika mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan. Pada titik ini, program-program yang melibatkan pengetahuan kognitif, berbasis kepercayaan, dan penyembuhan dapat diimplementasikan. Ide dasarnya adalah untuk meyakinkan target bahwa mereka harus (menciptakan “permintaan”) diberdayakan dan bahwa proses pemberdayaan ini berasal dari dalam diri mereka dan bukan dari sumber-sumber luar.

#### 2) Pengkapasitasan

Tahap ini kerap dikenal “*capacity building*”. Hal ini mengimplikasikan bahwa sebelum memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada seseorang, mereka harus kompeten. Daerah yang akan diotonomisasi dapat “cakap” dalam mengelola otonomi yang diberikan, maka program pengembangan kapasitas harus dilaksanakan sebelum otonomi daerah diberikan. Ada tiga kategori yang menjadi bagian dari proses pengembangan kapasitas, yaitu:

- a. Pengkapasitasan manusia, artinya memfasilitasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dengan merencanakan acara-acara seperti lokakarya, seminar, dan pelatihan. Ide dasarnya adalah untuk memungkinkan individu dan komunitas menerima kekuatan yang akan diberikan kepada mereka.
- b. Pengkapasitasan organisasi, artinya dilakukan dengan mereorganisasi entitas yang akan diberikan kewenangan atau kemampuan. Sebagai contoh, Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) didirikan untuk masyarakat yang kurang mampu sebelum peluang usaha ditawarkan. Penataan ulang organisasi daerah otonom agar memiliki pola *structure follow functions* agar memfasilitasi manajemen yang efisien.
- c. Pengkapasitasan sistem nilai, artinya seseorang dan wadahnya berkapasitas ketika sistem nilainya juga demikian.

“Aturan main” adalah sistem nilai. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, Peraturan Koperasi, dan dokumen serupa termasuk dalam lingkup sistem nilai organisasi. Sistem nilai mencakup budaya organisasi, etika, dan *good governance* pada tingkat yang lebih tinggi.

### 3) Pendayaan

Dalam makna sempit, pemberian kekuasaan, wewenang, atau kesempatan kepada target pemberdayaan merupakan tahap terakhir dalam proses pemberdayaan. Pemberian ini mengakomodasi aspirasi, sepadan dengan kualitas kemampuan yang dimiliki, dan mendorong evaluasi diri atas hasil dari keputusan yang telah diambil sebelumnya.

Berdasarkan uraian tahapan pemberdayaan masyarakat, tahapan diawali dengan kesadaran untuk berdaya secara sukarela, baik secara individu, kelompok, maupun lembaga, dan diakhiri dengan tahap yang dapat secara utuh dapat membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Pada penelitian ini digunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) meliputi tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

### **1.5.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat**

Faktor pendorong dan penghambat akan memengaruhi masyarakat dalam melakukan tahapan pemberdayaan guna mencapai tujuan kemandirian dan keberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat telah banyak terwujud ditandai dengan pencapaian tujuan kemandirian atau keberdayaan yang telah sesuai dengan tujuan kelompok masyarakatnya. Namun, tidak sedikit ditemukan kendala yang akan menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan atau tahapan dari pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut kerap kali juga berasal dari internal ataupun eksternal masyarakat yang juga turut memengaruhi tahapan pemberdayaan dalam masyarakat.

Menurut paradigma pembangunan masyarakat, gagasan pemberdayaan menunjukkan bahwa meskipun masyarakat dianggap sebagai gagasan yang lebih unggul dan menawarkan lebih banyak keuntungan, mereka tidak selalu terlibat sepenuhnya dalam setiap program. Hal ini disebabkan oleh beberapa variabel yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Margayaningsih (2018: 80-81) memberikan rekomendasi mengenai faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat. Elemen-elemen yang dapat mempengaruhi tahapan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Motivasi



Dorongan internal dan eksternal seseorang, yang dicirikan oleh minat dan keinginan, kebutuhan dan dorongan, tujuan dan impian, harapan, dan rasa hormat sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah alasan untuk seseorang melakukan tindakan atau kegiatan disebut sebagai motivasi. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, elemen yang berkontribusi dalam pembangunan, terutama selama tahap pemberdayaan masyarakat adalah motivasi dari para pelayan publik. Motivasi masyarakat juga berkontribusi dalam pengembangan potensi suatu daerah, selain motivasi dari perwakilan pemerintah.

## 2) Kebijakan Pemerintah

Untuk memastikan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud, para pelaksana pemberdayaan di masyarakat harus memperhatikan berbagai kebijakan pemerintah, baik yang diterbitkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, maupun surat perintah.

Sementara itu, kendala-kendala yang membatasi pemberdayaan masyarakat di berbagai tahapan adalah faktor penghambat yang ditemukan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan pemberdayaan, terdiri dari:

### 1) Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya pendukung untuk implementasi suatu kebijakan berhubungan erat dengan sumber

daya manusia. Salah satu sumber daya dapat diidentifikasi dengan melihat seberapa aktif sumber daya manusia mengelola sesuatu atau bagaimana mereka berpartisipasi dalam inisiatif pemberdayaan masyarakat.

## 2) Sarana dan Prasarana

Prasarana berfungsi sebagai penunjang paling penting terhadap terjadinya suatu kegiatan, sementara sarana merupakan sesuatu alat yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan. Keadaan sumber daya manusia masyarakat dengan sarana dan prasarana yang terlibat dalam pemberdayaan ini adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Pada realitanya, masih banyak ditemui keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tahapan pemberdayaan masyarakat sehingga hal tersebut dapat menjadi penghalang dalam meningkatkan pengembangan masyarakat.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo dipandang sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendongkrak perekonomian Desa Karangrejo dengan memanfaatkan potensi pariwisata, ditandai dengan tiga tahapan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- 1) Tahap Penyadaran, yaitu memberikan pengenalan pada masyarakat terkait kondisi lingkungan, seperti potensi dan persoalan. Fenomena yang diteliti adalah aspek potensi dan permasalahan di lingkungan wilayah Balkondes Karangrejo, serta aspek sosialisasi mekanisme dan prosedur di Balkondes Karangrejo.
- 2) Tahap Pengkapasitasan, yaitu memberikan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menjalankan potensi yang dimiliki melalui Balkondes Karangrejo. Fenomena yang diteliti adalah bentuk pelatihan dan pendampingan serta koordinasi dalam pengelolaan Balkondes Karangrejo.
- 3) Tahap Penderdayaan, yaitu memberikan peluang sesuai dengan kepemilikan kemampuan dan kompetensi masyarakat. Fenomena yang diteliti adalah kecakapan masyarakat dalam memanfaatkan peluang usaha, peran *stakeholders*, serta bantuan modal untuk pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo.

Adapun, faktor pendorong dan penghambat pada pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo merupakan faktor-faktor penunjang dan penghalang yang dapat memengaruhi pelaksanaan atau tahapan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah faktor pendorong pada pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo:

- 1) Motivasi, berkaitan dengan dorongan dan dukungan dari aparatur pemerintah Desa Karangrejo juga dorongan masyarakat sendiri yang

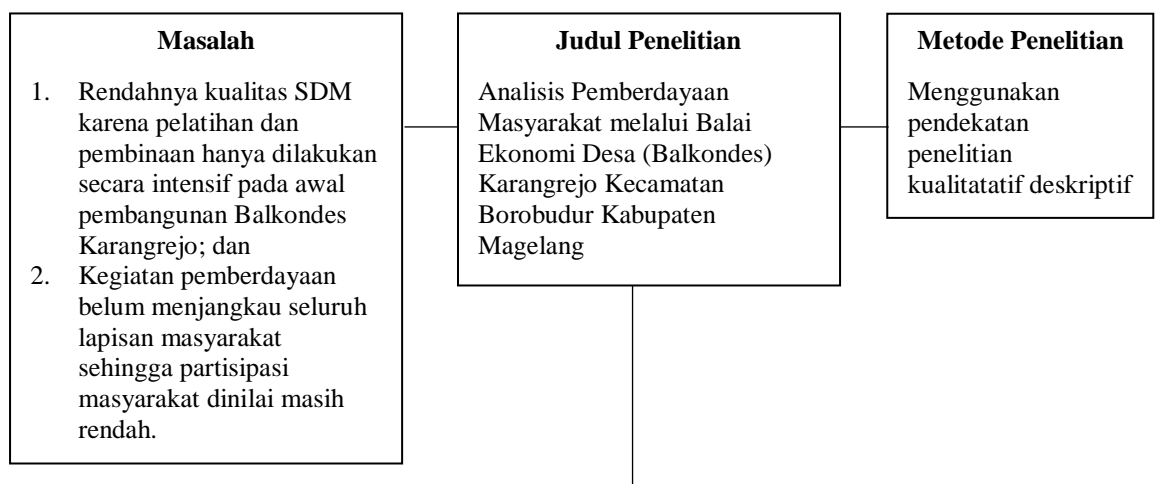
berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo; dan

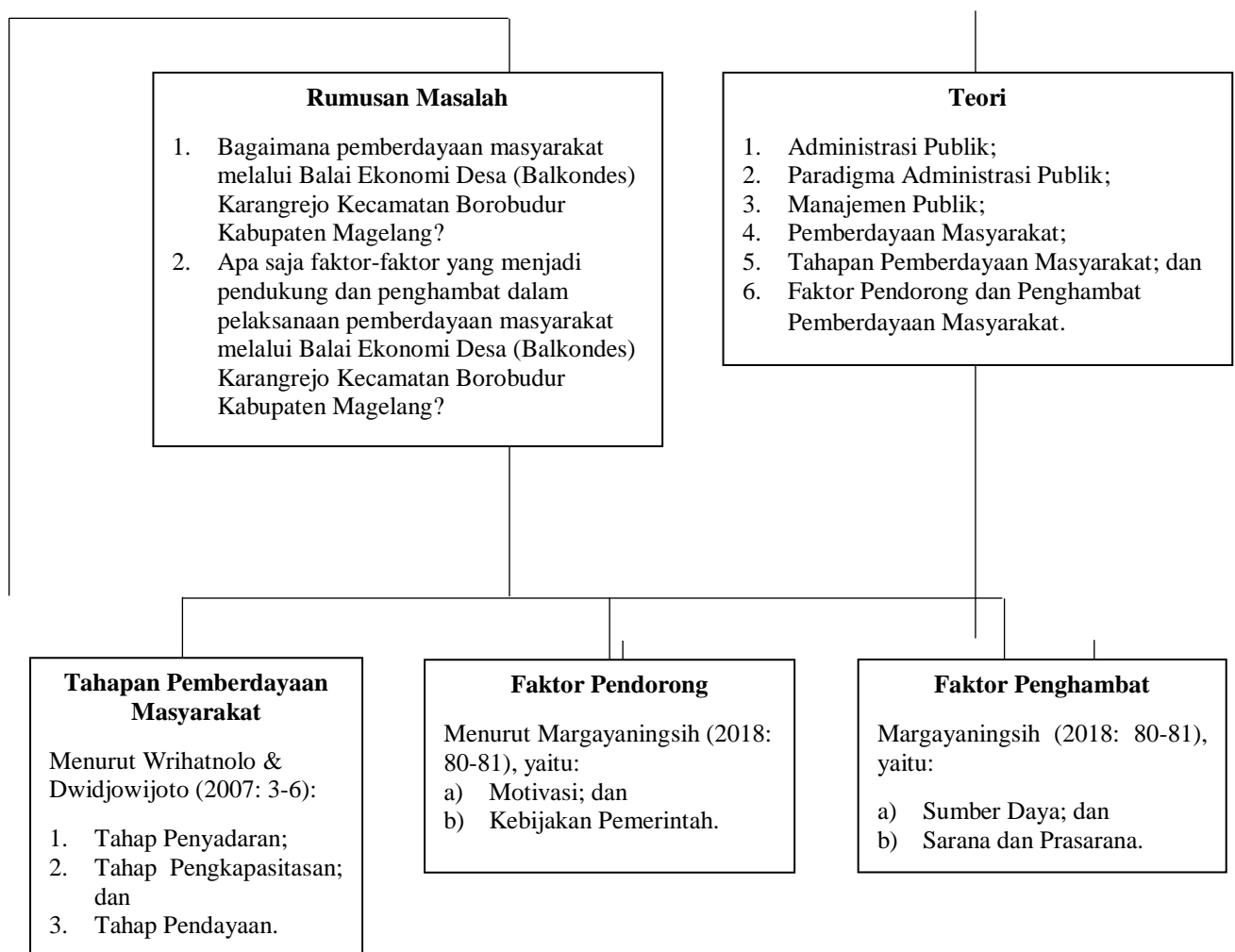
- 2) Kebijakan pemerintah, terkait dengan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan pemerintah, yang diharapkan mampu mempromosikan pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo.

Sementara, faktor penghambat pada pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo, antara lain:

- 1) Sumber daya, berhubungan dengan ketersediaan dan kecakapan sumber daya manusia yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo; dan
- 2) Sarana dan prasarana, berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan akses yang memadai guna menunjang pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo.

### 1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis





## 1.8 Argumen Penelitian

Pemerintah Daerah diberikan wewenang guna mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014, pemberian otonomi yang luas diberikan dalam rangka akselerasinya tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui pelibatan masyarakat, peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan. Industri pariwisata merupakan salah satu bidang di mana pemerintah dapat menyelenggarakan

inisiatif pemberdayaan masyarakat karena setiap daerah memiliki potensi untuk mengembangkan industri ini.

Kabupaten Magelang memiliki destinasi wisata super prioritas yang banyak diminati oleh wisatawan, yakni Candi Borobudur, namun keberadaannya kurang memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi lokal yang ada di sekitarnya karena desa-desa di sekitar Candi Borobudur masih berada di garis merah kemiskinan. Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di desa-desa kawasan Candi Borobudur, maka Kementerian BUMN mencanangkan salah satu program untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dengan pendirian Balai Ekonomi Desa.

Salah satu inisiatif pemberdayaan masyarakat desa di daerah tujuan wisata adalah Balai Ekonomi Desa (Balkondes), yang dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan menggunakan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) agar masyarakat setempat dapat merasakan keuntungan finansial dari kehadiran wisatawan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal dan memungkinkan pengembangan berbagai potensi sehingga taraf hidup di setiap desa di Kecamatan Borobudur menjadi meningkat. Desa Karangrejo, salah satu desa di Kecamatan Borobudur, memiliki Balai Ekonomi Desa (Balkondes). Balkondes ini didirikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Balkondes ini dibentuk melalui kerja sama antara PT Perusahaan Gas Negara dengan BUMDes Bumi Mulia Karangrejo untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat, seperti unit usaha

*homestay*, unit usaha *restaurant*, dan unit-unit UMKM lainnya yang berasal dari Desa Karangrejo sendiri.

Fenomena yang muncul pada penelitian ini terkait pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo, di antaranya adalah kesadaran masyarakat tentang pengembangan pariwisata, terutama Balkondes Karangrejo, dinilai masih rendah. Kemudian, bentuk pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo sendiri belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat terhadap Balkondes Karangrejo sendiri dapat dikatakan masih rendah. Adapun kelemahan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo, yakni terletak pada sistem manajemennya. Belum adanya perencanaan dalam jangka waktu secara pasti dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, lingkungan fisik dan infrastruktur Balkondes Karangrejo masih bermasalah. Penulis tertarik pada beberapa fenomena tersebut untuk menganalisis dan mendeskripsikan tahapan pemberdayaan masyarakat serta faktor pendorong dan penghambat di balik Balkondes Karangrejo di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang karena belum ada penulis lain yang meneliti fokus dan lokus tersebut, maka penulis menganggap bahwa penelitian ini masih baru.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, berlandaskan pada *postpositivisme*, dengan data yang dihimpun di lapangan (*field research*) dan dianalisis tanpa modifikasi (Sugiyono, 2013:7). Langkah-langkah berupa observasi terhadap fenomena yang dapat dideskripsikan secara menyeluruh dan ilmiah digunakan untuk melakukan investigasi. Dengan menggunakan metode ini, fenomena yang terjadi saat ini dimaksudkan untuk digambarkan dan dijelaskan berdasarkan fakta yang terjadi di tempat penelitian. Pendekatan kualitatif juga melihat fakta sosial sebagai sesuatu yang lebih kompleks, komprehensif, dinamis, signifikan, dan memiliki pola hubungan yang saling mempengaruhi. Peneliti atau penulis adalah alat utama dalam penelitian kualitatif sehingga untuk mengamati, mengevaluasi, menantang, dan menganalisis fenomena yang diteliti, peneliti harus memiliki teori sebagai panduan atau acuan untuk memperdalam pemahaman.

Penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang menggunakan gambaran deskriptif atau situasi dari objek penelitian dikenal sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif tidak menggunakan hubungan antarvariabel atau menarik generalisasi variabel penyebab dari suatu gejala atau kenyataan sosial melalui pengujian hipotesis. Penelitian



kualitatif deskriptif lebih menekankan pada data sebenarnya yang berada di lapangan tanpa adanya intervensi dari peneliti. Untuk menghasilkan data deskriptif tentang kondisi nyata di lapangan, berupa kata-kata, deskripsi, foto, dan catatan, data yang terkumpul akan dikaji secara ilmiah.

Selanjutnya, dengan memeriksa dan merinci tahapan pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo serta faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat, penulis menggunakan metodologi penelitian data deskriptif. Ketika melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, informasi yang dikumpulkan dari beragam sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang menghasilkan data deskriptif. Untuk meneliti pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo, penulis harus terlebih dahulu mengamati dan memahami fakta-fakta di lapangan sebelum membandingkannya dengan teori pendukung.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Wilayah atau tempat pelaksanaan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keadaan nyata yang terjadi pada suatu objek disebut dengan situs penelitian. Desa Karangrejo yang berada Dusun Bumen Djelapan, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang menjadi lokus penelitian sesuai

dengan fokus penelitian yang dipilih, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Sebagai informan, subjek penelitian memberikan data mendalam tentang penelitian ini. Beberapa narasumber telah dipilih oleh penulis untuk menjadi informan penelitian. Penggunaan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini ditujukan untuk menemukan informan. *Purposive sampling*, menurut pandangan Sugiyono (2013:85), merupakan teknik pengambilan sampel yang memperhitungkan informan kunci (*key informan*), yakni informan yang mempunyai pengetahuan akurat dan dapat dipercaya, sehingga orang yang akan dijadikan sampel atau informan diharapkan secara spesifik dapat memberikan pemahaman terhadap masalah dan fenomena dalam penelitian. Berikut adalah daftar-daftar informan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini:

- 1) Kepala Desa Karangrejo;
- 2) Ketua BUMDes Bumi Mulia Karangrejo;
- 3) Supervisor Balkondes Karangrejo;
- 4) Koordinator Unit Usaha *Homestay* Balkondes Karangrejo;
- 5) Ketua TP-PKK Desa Karangrejo; dan

6) *Tour guide* sebagai salah satu masyarakat pelaku usaha di Balkondes Karangrejo.

#### **1.9.4 Jenis Data**

Sugiyono (2013) membedakan antara dua kategori data, data kualitatif dan data kuantitatif. Alih-alih menggunakan data numerik atau statistik, penggunaan jenis data dalam penelitian kualitatif ini adalah serangkaian kata, frasa, dan pernyataan yang dapat menggambarkan keadaan atau fenomena yang ditemui selama proses penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas data jenis ini tidak dapat ditentukan; sebaliknya, data ini biasanya dikumpulkan melalui prosedur, seperti analisis konten, observasi, wawancara, dan sebagainya.

#### **1.9.5 Sumber Data**

Pandangan Lofland & Lofland (dalam Moleong, 2010: 157) dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama, lainnya merupakan data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain. Ada dua sumber data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini, yaitu (Sugiyono, 2013: 157):

1) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis kumpulkan secara langsung dari para informan dengan penggunaan teknik wawancara atau pengamatan langsung. Kepala Desa Karangrejo; Ketua BUMDes Bumi Mulia Karangrejo; Supervisor Balkondes Karangrejo; Koordinator Unit Usaha *Homestay* Balkondes Karangrejo; Ketua TP-PKK Desa Karangrejo; dan Masyarakat pelaku usaha di Balkondes Karangrejo adalah sumber-sumber informan yang menyediakan data primer untuk penelitian ini.

## 2) Data Sekunder

Data yang didapat melalui perantara atau secara tidak langsung dari objek penelitian dikenal sebagai data sekunder. Sumber data ini diperoleh dari literatur dan sumber-sumber yang berhubungan erat dengan persoalan yang diteliti, antara lain buku-buku, laporan-laporan, dokumen-dokumen, data statistik, dan sumber-sumber lainnya.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Tujuan utama penelitian ini adalah pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah terpenting dalam proses ini. Penulis tidak akan menerima data yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan jika tidak memahami betul teknik

pengumpulan data (Sugiyono, 2013:224). Memahami dan mengumpulkan informasi dari fokus permasalahan penelitian lebih dimudahkan dengan bantuan pengumpulan data. Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Pengamatan yang disengaja dan sistematis terkait fenomena sosial yang memperlihatkan gejala-gejala psikis dengan maksud guna selanjutnya dilaksanakan pencatatan disebut dengan observasi (Moleong, 2010: 187). Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2010: 174-175) berpandangan bahwa pengamatan langsung digunakan dalam penelitian kualitatif karena beberapa alasan, salah satunya penggunaan metodologi pengamatan yang berpijak pada pengalaman secara langsung. Dengan bantuan teknik ini, penulis dapat menyaksikan dan menyaksikan sendiri dan kemudian mendokumentasikan perilaku dan peristiwa yang terjadi dalam situasi dunia nyata. Penulis dapat mengantisipasi keraguan, ketidakakuratan, dan pandangan miring terhadap data yang dikumpulkan dengan menggunakan observasi guna mendokumentasikan kejadian dalam konteks yang berkaitan dengan pengetahuan yang proporsional atau pengetahuan yang diperoleh langsung dari data. Dengan melihat tindakan objek penelitian di Balkondes

Karangrejo, penulis terlibat dalam kegiatan objek dalam teknik observasi.

## 2) Wawancara

Percakapan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh dua orang disebut wawancara (Moleong, 2010: 186). Pengajuan pertanyaan dilakukan oleh pewawancara, dan pemberian jawaban atas pertanyaan itu dilakukan oleh terwawancara. Dalam format penggunaan teknik wawancara untuk penelitian ini, responden diizinkan untuk menjawab pertanyaan terbuka. Selanjutnya, wawancara bebas terpimpin menghasilkan sesi tanya-jawab yang memperjelas masalah dan mendekatkan pada hasil yang diinginkan. Pengumpulan data melalui wawancara dapat menggunakan pedoman wawancara dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan.

Secara umum, ada tiga kategori pendekatan wawancara yang dapat dibedakan: wawancara mendalam, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara terstruktur. Penulis akan menggunakan teknik wawancara mendalam dalam penelitian ini. Penulis berharap dapat menggali informasi dari informan mengenai pemberdayaan masyarakat di Balkondes Karangrejo secara langsung, formal, dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan data mengenai subjek

penelitian. Penulis kemudian akan menggunakan kamera, alat perekam, buku, dan alat tulis untuk wawancara.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2013) diartikan sebagai catatan peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan, gambar, laporan, biografi, peraturan, regulasi, laporan kinerja, dan kebijakan. Dokumen tertulis, seperti catatan, peraturan, dan kebijakan, sedangkan dokumen visual, seperti gambar, bagan, foto, dan alat bantu visual lainnya. Data sekunder yang berkaitan dengan dokumen, data statistik, dan informasi mengenai topik penelitian dikumpulkan dengan teknik dokumentasi melalui pengumpulan laporan dan arsip.

#### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data kualitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2010: 248) sebagai upaya yang dijalankan dengan data, mengorganisirnya, memilihnya menjadi satuan yang mampu dikelola, mensintesiskannya, menemukan pola, menemukan hal penting yang dapat dipelajari, dan memilih apa yang mampu diceritakan kepada pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Data tersebut akan dievaluasi secara teoritis dengan mempertimbangkan keyakinan, persepsi, pendapat, dan interpretasi dari para ahli di bidang pemberdayaan

masyarakat melalui Balkondes Karangrejo. Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:246), tahap-tahap analisis data yang diterapkan penulis dalam penelitian ini, meliputi:

#### 1) Reduksi Data

Dalam langkah reduksi data, data mentah yang dikumpulkan selama penelitian disortir, dirangkum, dan dipersempit menjadi elemen-elemen kunci yang dianggap penting untuk dipisahkan, disederhanakan, dan ditransformasikan. Prosedur ini dilakukan dalam upaya untuk membuat data menjadi mudah dipahami.

#### 2) Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian ditampilkan pada langkah berikutnya dalam bentuk deskripsi ringkas menggunakan grafik, tabel, diagram, dan alat bantu visual serupa. Pendekatan ini dianggap dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terkait apa yang terjadi, sehingga memungkinkan dalam perencanaan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Kumpulan data yang disusun untuk memberikan sebanyak mungkin pilihan untuk membuat keputusan dan memilih tindakan terbaik adalah cara lain untuk mengkonseptualisasikan penyajian data.

#### 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi



Kesimpulan pertama hanya bersifat sementara. Dalam penelitian kualitatif, penemuan baru atau temuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya disebut sebagai kesimpulan. Temuan ini dapat dianggap sebagai deskripsi rinci tentang hal yang diteliti, sehingga menjadi jelas dalam hal hubungan kausal, hipotesis, dan teori. Hasil penelitian ini tidak selalu berarti bahwa mereka akan tetap tidak berubah jika ada penelitian lain yang menghasilkan data yang meyakinkan.

#### **1.9.8 Kualitas Data**

Uji keabsahan data diperlukan untuk menunjukkan validitas dan reliabilitas data dalam penelitian kualitatif. Validitas, dalam bahasa Sugiyono (2013:267), merupakan derajat ketepatan yang ada antara data yang dapat dilaporkan oleh penulis dengan data yang sesungguhnya terjadi pada sasaran penelitian. Penulis menggunakan pendekatan triangulasi untuk menilai validitas data, yang didasarkan pada berbagai metode untuk mendapatkan data dan waktu yang berbeda. Pendekatan tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, antara lain (Sugiyono, 2013: 273-274):

- 1) Triangulasi sumber, yaitu triangulasi data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menguji kredibilitasnya;

- 2) Triangulasi teknik, yaitu triangulasi data yang sama tetapi menggunakan alat yang berbeda untuk menguji kredibilitasnya; dan
- 3) Triangulasi waktu, yaitu triangulasi data untuk menguji kredibilitasnya dengan cara memeriksanya dalam waktu atau situasi yang berbeda dan dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

Untuk menguji penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan triangulasi sumber dan teknik. Pendekatan triangulasi sumber digunakan karena, untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan dan valid, diperlukan banyak informan. Hal ini memungkinkan hasil akhir untuk dilihat dari berbagai sudut pandang dan memungkinkan untuk melihat fenomena yang diteliti dari beberapa sudut pandang. Kemudian, triangulasi teknik digunakan karena penulis membutuhkan data yang bersumber dari informan serta data, catatan, atau laporan yang dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan dokumentasi.